*Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 1 (2025) 26-37*

# MILITERISME DALAM POLITIK INDONESIA: SEJARAH RESTROSPEKTIF ORDE BARU DAN TANTANGAN DEMOKRASI

**Paryanto Paryanto[a], Isrofiah Laela Khasanah[b], Sugeng Riyanto[c], Wais Alqarni[d]**
[ab] Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
[c] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
[d] Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
E-mail: paryantorambang@gmail.com

**ABSTRAK**
Artikel ini menganalisis peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia dengan fokus pada dampaknya terhadap kestabilan kekuasaan dan tantangannya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Melalui metode literature review yang holistik, penelitian ini bertujuan merinci secara proaktif dampak jangka panjang peran militer dan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk menjaga objektivitas. Dengan menggali pemikiran dan motivasi di balik keputusan strategis militer, penelitian ini mengisi celah informasi dan memberikan wawasan mendalam terhadap konteks historis Orde Baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran militer berhasil menjaga kestabilan politik dengan konsekuensi negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan represif. Dominasi militer dalam kebijakan politik dan ekonomi juga menciptakan ketidaksetaraan dan korupsi. Evaluasi terhadap peran militer menyoroti kompleksitas kontribusinya, sementara dampaknya terhadap masyarakat dan oposisi menciptakan iklim politik otoriter. Implikasi terhadap perkembangan politik pasca-Orde Baru menciptakan tantangan dan peluang, memerlukan reformasi yang mendalam untuk memastikan transisi yang demokratis dan inklusif. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap peran militer dalam sejarah politik Indonesia ini membentuk pijakan kritis untuk membimbing pembangunan masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Demokrasi, Keamanan, Orde Baru, Militer, Stabilitas**

***ABSTRACT***
*This article analyzes the military's role in the New Order government system in Indonesia, focusing on its impact on power stability and the challenge of future democracy. Through a holistic literature review method, this study aims to proactively detail the long-term effects of the military's role and consider various perspectives to maintain objectivity. By delving into the thoughts and motivations behind military strategic decisions, this research fills information gaps and provides in-depth insights into the historical context of the New Order. The analysis results indicate that the military successfully maintained political stability with negative consequences such as human rights violations and repressive policies. Military dominance in political and economic policies also created inequality and corruption. Evaluation of the military's role highlights the complexity of its contribution, while its impact on society and opposition created an authoritarian political climate. Implications for post-New Order political developments present challenges and opportunities, requiring thorough reforms to ensure a democratic and inclusive transition. In conclusion, a profound understanding of the military's role in Indonesia's political history forms a critical foundation for guiding a future development that is more democratic and just.*

**Keywords:** ***Democracy, Military, New Order, Security, Stability***

* Corresponding Author.
E-mail: paryantorambang@gmail.com

*Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 1 (2025) 26-37*

## PENDAHULUAN

Peran militer dalam politik Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sering kali berdampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan dan kehidupan masyarakat, terutama selama era Orde Baru yang berlangsung dari 1966 hingga 1998 (Prasetiadi et al., 2021; Simun, 2019). Di bawah rezim Soeharto, militer berperan dominan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Sahrasad, 2018), sementara pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan sipil menjadi norma (Abugu & Onyishi, 2018). Pengesahan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 20 Maret 2025 memicu kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam politik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya telah memicu protes dari berbagai kalangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai arah masa depan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana pengaruh militer dapat memengaruhi kebijakan publik dan kehidupan sipil (Djuyandi, 2023; Mubarok et al., 2022).

Fenomena peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia telah menjadi fokus perdebatan yang mendalam, mewarnai narasi sejarah politik tanah air. Keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan pada era tersebut menjadi bagian integral dari proses pembentukan dan pemeliharaan kestabilan politik (Prasetiadi et al., 2021). Dealektika tersebut tidak hanya mencerminkan keberagaman pandangan terkait peran militer dalam kebijakan politik, tetapi juga memberikan wawasan tentang transformasi politik Indonesia (Ng & Kurniawan, 2024). Militer, sebagai kekuatan yang turut membentuk arah kebijakan negara, memainkan peran sentral dalam menciptakan dan menjaga stabilitas politik (Aspinall & Fealy, 2010), memberikan dimensi unik pada pemerintahan Orde Baru (Subari & Hidayati, 2023). Pemahaman mendalam terkait fenomena ini tentu saja dibutuhkan, terutama sebagai jendela untuk melihat dinamika politik Indonesia yang terus berkembang hingga hari ini.

Menggali dan memahami peran militer pada masa Orde Baru karena itu menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Militer memegang peran sentral dalam membentuk dinamika politik Indonesia (Inpantri et al., 2022; Vonika, 2020), bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia (Faqih, 1981; Joshua, 2023). Keterlibatan militer tidak hanya terbatas pada ranah keamanan, tetapi juga ekonomi (Ardianto et al., 2022), serta pada ranah kehidupan sipil lainnya. Hal ini tentu saja berdampak signifikan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan strategis Negara, baik di tingkat lokal maupun pada lingkup nasional (Djuyandi, 2023; Djuyandi & Ghazian, 2019; Mubarok et al., 2022). Dalam konteks ini, peran militer tidak saja telah membentuk sudut pandang tersendiri dalam kajian politik tetapi juga signifikan dalam mewarnai dan menentukan arah pembangunan Negara (Razaq, 2024). Pemahaman tentang peran militer pada masa Orde Baru diperlukan sebagai landasan untuk memahami kompleksitas dinamika politik kontemporer di Indonesia yang terus berkembang di hingga saat ini (Gunawan, 2022; Khairurrizqo, 2024; Kimura et al., 2024).Singkatnya, kompleksitas dinamika politik Indonesia saat ini dapat ditelusuri kembali terutama dengan melihat kuatnya pengaruh dan keputusan Negara tentang peran militer pada masa lalu (Simun, 2019).

Sejumlah studi dan publikasi telah mengupas fenomena peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia, seperti peran ekonomi (Ardianto et al., 2022), dwi fungsi ABRI (Djuyandi, 2023; Inpantri et al., 2022), serta operasi militer dalam rangka mengatasi pemberontakan (Said, 2015), sparatisme (Hartati, 2010), dan terorisme (Mengko, 2017). Meskipun literatur tersebut memberikan pemahaman tentang peran militer yang beragam, tetapi masih terdapat argument kuat untuk diperlukan kajian lebih lanjut. Sebagian besar kajian cenderung bersifat historis dan fokus pada deskripsi peristiwa tanpa menganalisis dampaknya secara menyeluruh. Keterbatasan ini mempengaruhi keobjektifan analisis terhadap peran militer dalam dinamika politik dan pemerintahan pada era Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu

merumuskan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, mengatasi kekurangan tersebut untuk memperdalam pemahaman terhadap peran militer dalam konteks Orde Baru.

Dalam upaya mengisi kekurangan literatur yang telah ada, tulisan ini berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih holistik dan obyektif terkait fenomena peran militer pada masa Orde Baru di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk mengisi celah dengan mengeksplorasi pemikiran dan motivasi di balik keputusan strategis dalam konteks perubahan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih kaya tentang sejarah militerisme pada era Orde Baru dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan demokrasi Indonesia di masa depan.

Untuk mencapai tujuan pertama dalam merancang analisis yang lebih proaktif, tulisan ini melakukan analisis dampak peran militer pada Orde Baru dengan menghubungkannya secara kontekstual dengan perkembangan politik pasca-Orde Baru. Melalui pendekatan ini, tulisan ini menyajikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana peran militer pada masa lalu memengaruhi perkembangan politik kontemporer. Selanjutnya, untuk menjaga objektivitas dan inklusivitas, tulisan ini berusaha memperhatikan berbagai sumber dan sudut pandang yang mewakili spektrum opini yang lebih luas. Dengan menganalisis literatur dari berbagai latar belakang akademis dan ideologis, tulisan dapat menghindari bias yang mungkin muncul dari perspektif yang terlalu terfokus. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan militer, membuka jendela pada pemikiran dan strategi yang mendasari peran strategis militer dalam pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, analisis yang komprehensif dapat memberikan kontribusi substansial terhadap literatur sejarah politik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode *literature review* menjadi fondasi dasar dalam membentuk kerangka konseptual dan analisis dalam tulisan ini (Darmalaksana, 2020). Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan fenomena peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Dalam penelitian ini, basis data akademis, perpustakaan digital, dan buku menjadi sumber utama untuk memastikan cakupan yang komprehensif (Hayati, 2021). Untuk menghindari bias dalam hasil penelitian dan memastikan validitas data maka kriteria seleksi data dilakukan dengan fokus pada militer dalam sistem politik Indonesia era Orde Baru. Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk menyaring literatur yang paling relevan dan memiliki kredibilitas akademis yang tinggi. Tingkat relevansi dilihat denga mengidentifikasi data berdasarkan kesesuaian tema. Setelah sumber-sumber teridentifikasi, proses seleksi dilakukan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian literature yang distudi dengan tema kajian, yakni ekistensi dan posisi militer dalam praktik politik Indonesia. Evaluasi kualitas metodologi penelitian, tahun publikasi, dan kebaruan konsep juga diperhitungkan.

Penelitian mendalam dilakukan terhadap setiap sumber literatur yang terpilih. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama, perkembangan kronologis, dan dampak peran militer pada stabilitas politik Orde Baru. Kritik konstruktif terhadap keterbatasan dan kelebihan setiap sumber literatur diuraikan dengan jelas, memastikan objektivitas penilaian. Selanjutnya, pendekatan pembanding digunakan untuk membandingkan dan menyintesis temuan-temuan literatur. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah dalam penelitian yang telah ada. Melalui pembandingan ini, tulisan ini dapat merumuskan kesimpulan yang lebih kuat dan mendalam. Dalam keseluruhan metode *literature review* ini, integritas akademis dan objektivitas menjadi pijakan utama. Dengan melibatkan sumber-sumber literatur yang beragam, evaluasi kritis, dan pendekatan pembanding, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman tentang

peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi Militer dalam Mengelola Pertahanan dan Keamanan

Pada era Orde Baru di Indonesia, peran utama militer menjadi sangat signifikan dalam menjaga keamanan negara. Sebagai kekuatan militer utama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat itu masih menjadi gabungan matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian, memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan menanggulangi ancaman keamanan domestik serta potensi konflik regional (Azwar & Suryana, 2021). Sebagai institusi pertahanan utama, ABRI menghadapi ancaman serius baik dari dalam maupun luar negeri (Haripin, 2022). Ancaman pemberontakan, terorisme, dan potensi konflik regional mewarnai panggung politik Indonesia pada masa itu.

Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, peran militer menjadi krusial untuk memastikan stabilitas keamanan. Keberhasilan TNI dalam menanggulangi ancaman-ancaman tersebut telah diakui secara luas dan memberikan legitimasi kuat bagi keterlibatan militer dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru (Mardhani, 2020). Keberhasilan militer dalam menjaga keamanan pada masa Orde Baru tak luput dari munculnya sejumlah kritik dan kontroversi. Penggunaan kekerasan dan cara-cara refresif yang dilakukan oleh tentara dalam menanggulangi gerakan separatis dan terorisme adalah contoh tindakan yang banyak mendapatkan sorotan public domestik dan internasional. Tindakan represif ini terlihat pada operasi militer besar-besaran yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk meredam dan memberantas gerakan pemberontakan dan sparatis (Purbaya, 2019), tindakan terorisme, serta menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan.

Berbagai operasi militer yang represif seperti yang dilakukan di Aceh, Papua, dan Timor Timur menjadi sorotan publik. Pelaporan tentang penyiksaan, penghilangan paksa, dan tindakan kekerasan lainnya mencuat ke permukaan, menyuarakan keprihatinan akan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer (Prasasti & Anggraini, 2020). Dalam konteks ini, penting disadari bahwa keberhasilan militer dalam menjaga keamanan tidak otomatis melupakan dampak sosial dan politik yang terjadi pada perspektif yang lebih luas. Penggunaan kekuatan militer dalam konteks keamanan domestik memunculkan dampak yang kompleks dan berkepanjangan bahkan sampai jauh setelah berakhirnya rejim Orde Baru.

Terlepas dari legitimasi yang mereka dapatkan dalam menjaga stabilitas, tindakan keras militer juga menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Di satu sisi, tindakan ini mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah yang melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk mempertahankan integritas negara, terutama dalam menanggapi pemberontakan dan gerakan separatis, militer dianggap sebagai penjaga kedaulatan yang tak tergantikan (Siddiq, 2019). Namun, di sisi lain, dampak negatifnya tak dapat diabaikan. Terkonsentrasinya kekuasaan pada militer memberikan potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional dan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman dapat menghasilkan dampak yang merugikan, terutama bagi hak-hak sipil dan kebebasan individu (Permatasari & Pransisca, 2021).

Dominasi militer dalam struktur politik Orde Baru menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan dalam arsitektur dan sistem politik Indonesia. Peran militer pada masa Orde Baru tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pemain utama dalam panggung politik domestik. Infiltrasi dan ekspansi kekuatan militer masuk jauh ke dalam struktur budaya melalui integrasi wacana dalam materi pembelajaran sekolah (Purwanta, 2017). Dominasi ini menempatkan militer pada peran kunci dalam pengambilan kebijakan, pemilihan presiden, dan struktur kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menciptakan dinamika

politik yang korporatis, di mana kepentingan militer seringkali mendahului kepentingan rakyat (Subari & Hidayati, 2023).

Kepemimpinan militer yang terlibat dalam kebijakan dan penentuan nasib politik menciptakan monopoli kekuasaan (Oktaviani & Pramadya, 2019). Meskipun hal ini memberikan kestabilan pada politik dan pemerintahan, namun berdampak merugikan pada perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan negara. Melalui kontrol politik yang kuat, militer turut membentuk sistem kebijakan nasional. Berbagai kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang diimplementasikan pada masa itu seringkali mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi militer. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan politik, kondisi yang memperkuat pandangan bahwa Orde Baru lebih mirip dengan pemerintahan militer otoriter daripada sistem demokratis (Subari & Hidayati, 2023).

Dalam konteks pembangunan nasional, dominasi militer juga memicu ketidaksetaraan dalam partisipasi masyarakat sipil. Upaya untuk membentuk alternatif politik dan mendukung perkembangan demokrasi sering dihadang oleh kendali militer yang ketat. Pembatasan kebebasan berpendapat, kegiatan politik yang terorganisir, dan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi sulit untuk direalisasikan. Dalam konteks perkembangan politik pasca Orde Baru, upaya demokratisasi dan reformasi institusi militer mencerminkan respons terhadap kekurangan dan kesalahan masa lalu. Munculnya konsep sipil-militer baru, di mana militer diakui sebagai lembaga yang harus tunduk pada otoritas sipil (Riza, 2020), mencerminkan perubahan paradigma dan upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan yang ada. Reformasi institusi militer mencakup pembatasan kekuasaan militer, peningkatan transparansi, dan keterlibatan lebih lanjut dari sipil dalam pengambilan keputusan keamanan nasional. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, langkah-langkah ini menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pembangunan demokratis dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Subari & Hidayati, 2023).

## B. Keterlibatan Militer dalam Kebijakan Politik

Pada masa Orde Baru di Indonesia, keterlibatan militer dalam kebijakan politik menjadi fenomena yang mendalam dan kontroversial. Saat itu, ABRI, tidak hanya memegang peran sebagai penjaga keamanan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan politik. Keterlibatan ini mencakup pemilihan presiden, penetapan kebijakan nasional, dan pengaruh yang kuat pada struktur politik di tingkat daerah (Djuyandi & Ghazian, 2019). Sebagai pilar keamanan negara, militer tentu saja mendapatkan legitimasi kuat dalam mempengaruhi dinamika politik pada periode tersebut. Namun, sisi positif ini juga disertai dengan kritik terhadap cara keras dan dominasi militer, serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi.

Keterlibatan militer dalam penetapan kebijakan nasional pada masa Orde Baru menciptakan pola politik yang mencengangkan. Militer tidak hanya memberikan kontribusi dalam perencanaan strategis keamanan nasional, tetapi juga terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Keberhasilan militer dalam menjaga keamanan memberikan legitimasi kuat bagi mereka untuk terlibat dalam kebijakan nasional (Oktaviani & Pramadya, 2019). Presiden Soeharto yang sebelum menjabat presiden merupakan pemimpin militer memegang kendali atas proses pembuatan kebijakan. Peran mereka sering jauh lebih dominan daripada suara partai politik atau kelompok masyarakat sipil. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam dinamika politik, di mana keputusan strategis negara sering kali dipengaruhi oleh keterlibatan dan intervensi kekuatan militer (Siddiq, 2019).

Keterlibatan militer dalam proses pemilihan presiden menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam pembentukan politik Orde Baru. Pada era Orde Baru, militer memiliki peran signifikan dalam proses pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Hal ini terjadi karena kekuatan militer terwakili

melalui keberadaan Fraksi ABRI baik di Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsekwensinya, meskipun proses pemilihan presiden dilakukan secara formal di MPR RI, tetapi tetap saja kuat dipengaruhi oleh intervensi militer dalam mendukung kandidat yang diinginkan (Astana, 2023). Hal ini menciptakan dinamika politik yang cenderung otoriter, dengan militer memainkan peran penentu dalam pemilihan pemimpin tertinggi negara. Keterlibatan militer dalam pemilihan presiden menciptakan ketidaksetaraan politik dan pembatasan alternatif politik.

Kandidat yang memiliki hubungan baik dengan militer memiliki keunggulan yang signifikan, sementara partai atau kandidat yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan militer menghadapi hambatan serius. Pemilihan presiden yang diatur dengan ketat oleh militer menghasilkan pemandangan politik yang kurang demokratis, di mana pilihan rakyat dibatasi oleh dominasi militer (Muharrom, 2019). Lebih lanjut, ketidakseimbangan kekuasaan yang dihasilkan dari dominasi militer menciptakan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia (Prasasti & Anggraini, 2020).

## C. Dampak Peran Militer Terhadap Stabilitas Kekuasaan

### 1. Stabilitas Pemerintahan

Pada masa Orde Baru di Indonesia, peran militer dalam menjaga kestabilan pemerintahan dianggap sebagai elemen kunci dalam dinamika politik. Keberhasilan militer, dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam menanggulangi ancaman dan mempertahankan ketertiban, menjadi pilar keamanan yang memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sosial dan politik (Farchan, 2020). Stabilitas ini menjadi primadona pada era Orde Baru. Karena stabilitas sosial politik menjadi prasyarat lancarnya proses pembangunan dan upaya menggerakkan roda perekonomian. Namun, di balik pencapaian ini, cara dan pendekatan represif yang digunakan militer serta keterlibatan aktif militer dalam urusan politik pemerintahan telah menciptakan dampak sosial yang kompleks.

Penting untuk mengakui bahwa militer pada masa Orde Baru memang dinilai cukup berhasil dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. TNI mampu menanggulangi ancaman keamanan domestik, seperti pemberontakan dan potensi konflik regional. Keberhasilan ini memberikan legitimasi kuat bagi peran militer dalam kebijakan pemerintahan, membentuk narasi keamanan yang menjadi dasar kuat rezim Orde Baru. Dalam memastikan stabilitas politik, militer juga berperan sebagai penjaga ketertiban internal. Partisipasi militer dalam mengendalikan demonstrasi dan memadamkan potensi kerusuhan dianggap sebagai langkah efektif dalam mempertahankan kontrol atas situasi politik. Pada tingkat nasional, dominasi militer dianggap sebagai kekuatan yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas, menciptakan citra pemerintahan yang kuat dan terkendali (Azwar & Suryana, 2021).

Keberhasilan militer dalam menjaga stabilitas politik telah memunculkan dilema terutama terkait dengan cara penindakan yang digunakan. Keterlibatan militer dalam politik domestik, terutama dalam operasi prepresif terhadap gerakan separatis dan pemberontakan, menciptakan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Cara represif yang keras, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, meninggalkan luka yang mendalam dalam masyarakat. Pemberlakuan hukuman yang tidak adil, penahanan tanpa proses hukum yang sesuai, penyiksaan, dan penghilangan paksa adalah praktik yang terus mewarnai sejarah peran militer di era Orde Baru. Dampak psikologis dan emosional dari cara ini membentuk resistensi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik represif memunculkan resistensi terhadap rezim, menciptakan gerakan bawah tanah dan opini yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia juga menciptakan trauma kolektif dalam masyarakat yang masih terasa hingga kini. Ketidakstabilan sosial juga muncul akibat polarisasi politik yang diciptakan oleh dominasi militer. Pembatasan kebebasan

berpendapat dan partisipasi politik yang terbatas menciptakan ketidaksetaraan dalam arena politik.

Dalam merespons cara represif dan pelibatan militer, masyarakat di bawah rezim Orde Baru tidak tinggal diam. Gerakan perlawanan dan resistensi muncul sebagai bentuk protes terhadap praktik-praktik otoriter. Aktivis hak asasi manusia, intelektual, dan kelompok masyarakat sipil berani berbicara melawan pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut perubahan. Perlawanan terhadap rezim juga melibatkan kelompok-kelompok yang mendukung demokrasi dan hak-hak politik. Meskipun dalam kondisi sulit, upaya-upaya ini menciptakan titik awal untuk gerakan reformasi yang akhirnya meruntuhkan Orde Baru pada tahun 1998. Resistensi masyarakat adalah bukti bahwa meskipun berada di bawah tekanan, semangat untuk mendapatkan keadilan dan demokrasi tetap hidup.

**2. Struktur Kekuasaan**

Pada masa Orde Baru di Indonesia, dominasi militer dalam struktur kekuasaan menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Kepemimpinan militer yang terlibat dalam kebijakan dan penentuan nasib politik menciptakan monopoli kekuasaan yang berdampak pada kestabilan pemerintahan, namun merugikan perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil (Subari & Hidayati, 2023).

Penting untuk memahami bahwa dalam Orde Baru, militer memiliki peran yang mendalam dalam struktur kekuasaan. Kepemimpinan militer, terutama di bawah Presiden Soeharto, tidak hanya menjalankan fungsi keamanan tetapi juga terlibat dalam pengambilan kebijakan dan politik pemerintahan. Hal ini menciptakan monopoli kekuasaan di tangan militer, yang pada satu sisi memberikan kestabilan pada pemerintahan, namun pada sisi lain, membatasi pluralisme politik dan partisipasi masyarakat sipil. Dominasi militer menciptakan hierarki yang kuat di dalam pemerintahan, dengan keputusan strategis yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan militer. Posisi militer yang dominan membuat keputusan politik lebih cenderung mempertahankan status quo yang menguntungkan kepentingan militer, daripada mendorong reformasi dan perkembangan demokratis (Astana, 2023).

Dominasi militer dalam struktur kekuasaan memberikan dampak yang negatif pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat sipil dan partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi menjadi terbatas akibat kontrol ketat militer (Sumantri, 2017). Pemilihan Umum sebagai instrument dan mekanisme legal suksesi kekuasaan memang dislenggarakan secara periodik tetapi berada dalam bayang-bayang otorianisme kekuasaan militer (Mietzner, 2018). Kuatnya dominasi militer menjadi kendala utama terhadap perkembangan demokrasi dan partisipasi politik warga Negara. Partai politik pada era Orde Baru, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai instrument demokrasi dan politik partisipatif seringkali ditekan atau dihambat. Kondisi ini tentu saja menciptakan lingkungan politik yang kurang inklusif. Pembatasan ini menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan militer dan kepentingan rakyat.

Dominasi militer juga membentuk dinamika politik yang sering mendahulukan kepentingan militer daripada kepentingan rakyat. Keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi, politik, dan sosial menciptakan struktur politik yang lebih mementingkan kepentingan internal militer daripada kebutuhan rakyat (Pratiwi et al., 2019). Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan dan alokasi sumber daya sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan militer daripada kebutuhan masyarakat. Proyek-proyek besar dan pengeluaran pemerintah dapat lebih cenderung mendukung kepentingan militer, meninggalkan kebutuhan masyarakat sipil terabaikan. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat merugikan perkembangan negara secara keseluruhan.

Pembatasan kebebasan berpendapat dan aktivitas politik oleh militer menjadi ciri khas Orde Baru (Hill, 2011). Lingkungan politik yang diawasi ketat menyebabkan masyarakat sipil dan partai politik sulit untuk

mengemukakan pandangan kritis terhadap pemerintahan. Aktivitas politik yang terorganisir seringkali dihadapi dengan represi dan penindasan, menyebabkan pembatasan hak-hak dasar masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Kebebasan pers juga terdampak oleh dominasi militer, dengan media cenderung diperintah dan diawasi oleh pemerintah. Informasi yang dapat diakses masyarakat menjadi terbatas, menghambat kemampuan mereka untuk membentuk pandangan independen dan kritis terhadap pemerintah (Murtiningsih & Siswanto, 1999).

**D. Implikasi Terhadap Perkembangan Politik dan Demokrasi**

Peran militer pada masa Orde Baru membentuk fondasi politik Indonesia yang masih terasa hingga hari ini. Meskipun telah terjadi transformasi politik pasca Orde Baru, dengan upaya demokratisasi dan reformasi institusi militer, jejak-jejak kebijakan dan praktik-praktik otoriterisme masa lalu tetap memengaruhi dinamika politik kontemporer (Farchan, 2020). Upaya demokratisasi tersebut sejalan dengan reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan, yang mencoba mengubah paradigma sipil-militer dengan menegaskan militer sebagai lembaga yang harus tunduk pada otoritas sipil (Hilal et al., 2022).

Periode Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto, memberikan warisan otoriterisme yang kuat dalam dinamika politik Indonesia. Dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik, pembatasan kebebasan berpendapat, dan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia menciptakan luka dan trauma yang mendalam dalam masyarakat (Sumantri, 2017). Meskipun era Orde Baru berakhir pada tahun 1998, warisan otoriterisme ini masih terasa dan berlanjut hingga saat ini. Tindakan represif militer dalam penanggulangan terorisme terhadap Komando Jihad pada era Orde Baru terlihat cukup kuat mempengaruhi paradigma penanggulangan terorisme pada era selanjutnya. Paradigma islamophobia yang cenderung simplistik dan stigmatik dengan memposisikan Islam dan kaum Muslim sebagai sang tertuduh pelaku tindakan terorisme (Paryanto et al., 2023).

Transformasi politik pasca Orde Baru telah menunjukkan upaya menuju demokratisasi. Gagalnya rezim Orde Baru dalam menangani krisis ekonomi, tuntutan reformasi, dan tekanan dari masyarakat sipil mengarah pada kejatuhan rezim pada tahun 1998. Ini membuka jalan bagi perubahan paradigma politik menuju sistem yang lebih demokratis. Proses demokratisasi diawali dengan revisi konstitusi pada tahun 1999, yang menghilangkan ketentuan-ketentuan otoriter dan memberikan landasan bagi pembentukan sistem politik yang lebih inklusif (Aspinall, 2005). Pemilihan umum langsung dan partisipasi partai politik yang lebih beragam menciptakan kerangka kerja demokratis yang baru. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan, upaya demokratisasi ini menandai langkah awal menuju masyarakat yang lebih terbuka dan partisipatif (Suparno, 2012).

Reformasi institusi militer menjadi bagian integral dari transformasi politik pasca Orde Baru. Kritik terhadap dominasi militer dalam politik dan pelanggaran hak asasi manusia memaksa pemerintahan pasca Orde Baru untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang signifikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuatan politik militer dan menjadikan militer sebagai lembaga yang tunduk pada otoritas sipil. Munculnya konsep sipil-militer baru mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara sipil dan militer (Yulianto, 2023). Pemerintah berusaha untuk menetapkan batasan yang jelas antara fungsi militer dan pemerintahan sipil (Hilal et al., 2022). Hal ini termasuk pengurangan kehadiran militer dalam politik, dengan menghapus kursi militer di parlemen, serta menggencarkan reformasi internal dalam militer untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Konsep sipil-militer baru menggambarkan transformasi hubungan antara militer dan pemerintah sipil. Dalam paradigma ini, militer diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil (Permana, 2021; Riza, 2020). Ini menciptakan landasan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah

terulangnya dominasi militer yang otoriter. Pentingnya konsep ini terlihat dalam reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan. Perubahan dalam struktur komando militer dan penyesuaian dalam kebijakan pertahanan nasional mencerminkan upaya untuk menciptakan militer yang lebih profesional dan tunduk pada prinsip-prinsip demokratis (Zakky & Salsabilla, 2022).

Meskipun ada upaya menuju demokratisasi dan reformasi institusi militer, tantangan dan kendala tetap hadir. Politik patronase, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam akses ke kekuasaan politik masih merupakan tantangan utama. Beberapa praktik otoriterisme juga bertahan, terutama di tingkat lokal, menghambat perkembangan demokrasi yang lebih substansial (Hilal et al., 2022). Proses demokratisasi yang berkelanjutan memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam menanggulangi tantangan ini. Penguatan lembaga-lembaga demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang adil menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa transformasi politik tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga meresap ke struktur inti pemerintahan (Permana, 2021).

Implikasi jangka panjang dari transformasi politik pasca Orde Baru mencakup pembentukan fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi dan keamanan nasional. Konsep dan pola relasi sipil-militer baru membawa harapan untuk mengurangi potensi kudeta militer dan menciptakan stabilitas politik yang lebih berkelanjutan. Demokratisasi juga membuka pintu bagi inklusivitas politik, dengan partai-partai dan kandidat yang mewakili berbagai spektrum ideologis dapat bersaing secara adil dalam arena dan kontestasi politik elektoral (Salahudin et al., 2020). Pentingnya mengatasi jejak-jejak otoriterisme masa lalu memberikan dorongan untuk terus mendorong reformasi dan demokratisasi. Melalui pembelajaran dari pengalaman masa lalu, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih terbuka, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan pembentukan fondasi yang kokoh untuk demokrasi dan keamanan nasional, serta melalui relasi sipil-militer yang lebih seimbang dan inklusivitas politik yang lebih luas, Indonesia dapat menuju pada stabilitas politik yang berkelanjutan. Pada masa Orde Baru, dominasi militer terlihat pada pola relasi antara kekuatan militer dan pemerintah yang terlalu terpusat pada kepentingan politik kekuasaan. Namun, pasca Orde Baru, terjadi perubahan dalam relasi ini. Dalam konteks ini, kritik publik yang mengemuka terkait dengan perubahan undang-undang TNI yang dikhawatirkan dapat membawa kembali suasana represi militer serupa dengan era Orde Baru menuntut perhatian lebih agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Kritik publik tersebut mencerminkan adanya skeptisisme sejumlah kalangan akan potensi pemerintah untuk kembali mengerahkan kekuatan militer dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan politik, yang bisa mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah dapat merespon kritik publik dengan inisiasi berbagai program penyadaran dan pendidikan. Melalui berbagai program pendidikan, publik diharapkan dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih efektif dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, kombinasi antara tuntutan reformasi dan spirit demokratisasi, bersama dengan kebijakan dalam penguatan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, akan memastikan bahwa Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih terbuka, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Peran militer sebagai pilar keamanan terbukti berhasil menjaga stabilitas pada satu sisi, namun keberhasilan tersebut tidak lepas dengan kontroversi dan dampak negatif terhadap hak asasi manusia serta demokrasi. Evaluasi terhadap dominasi militer dalam kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru mengungkapkan ketidaksetaraan dan korupsi yang merugikan masyarakat. Seiring dengan itu, peran militer menciptakan tantangan

berat bagi perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru, memerlukan reformasi yang mendalam dan pengembangan institusi demokratis yang kuat. Warisan politik ini juga menciptakan keterkaitan antara sejarah dan perkembangan politik kontemporer Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan evaluasi yang cermat terhadap peran militer dalam Orde Baru bukan hanya sebagai sejarah retrospektif, melainkan sebagai pijakan kritis untuk membentuk arah pembangunan politik dan demokrasi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Dengan mengambil pelajaran dari masa lalu, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depannya yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abugu, S. O., & Onyishi, A. E. (2018). Military Dictatorship, Democratization and the Struggle for National Development in Post-Soeharto Indonesia. *Journal of Security Studies and Global …*. https://www.sciplatform.com/index.php/jssgp/article/view/94

Ardianto, Y., Kurniawan, P. W., & Ciciria, D. (2022). Keterlibatan Militer dalam Ekonomi Indonesia Pada Tahun 1965-1998. *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *4*(1), 1–11.

Aspinall, E. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *South East Asia Research*, *13*(2), 117–156.

Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2010). *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*. ANU E Press.

Astana, C. B. (2023). Kapitalisasi semu dan bisnis militer masa Orde Baru. *NAGRI PUSTAKA*.

Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik …*.

Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. In *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung …*. digilib.uinsgd.ac.id.

Djuyandi, Y. (2023). Development of Military Role in Indonesian Government. *Journal of Governance*, *8*(3), 413–426. https://doi.org/10.31506/jog.v8i3.20907

Djuyandi, Y., & Ghazian, M. G. (2019). Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil dan Hierarki Militer. In *Wacana Publik*. academia.edu.

Faqih, F. (1981). *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period, The Foundation of The New Order State (1950-1965)*. BRILL.

Farchan, Y. (2020). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*.

Gunawan, A. B. (2022). *Under the Shadow of Army Domination: Defense Transformation in Indonesia* [Karls Universität Heidelberg]. https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/32141/%0Ahttps://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/32141/1/Dissertation_ABGunawan_ComVer_082022.pdf

Haripin, M. (2022). *Intelijen dan keamanan nasional di Indonesia pasca-Orde Baru*. books.google.com.

Hartati, A. Y. (2010). Separatisme dalam Konteks Global (Studi tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai Gerakan Separatis Indonesia. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, *7*(2), 1–10.

Hayati, R. (2021). Pengertian Penelitian Studi Literatur, Ciri, Metode, Dan Contohnya. In *2021*.

Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & ... (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. books.google.com.

Inpantri, A. G., Siddiq, M. I. H., Jayanti, M. P., & Alhabsy, M. I. (2022). The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period. *Social Impact Journal*, *1*(2), 191–200.

https://doi.org/10.61391/sij.v1i2.21

Joshua, N. (2023). *Fashioning Authoritarianism: Militarization of Society in Indonesia, 1930-1966*. Nortwestern University.

Khairurrizqo, K. (2024). Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *7*(3), 898–909. https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39387

Kimura, E., Istania, R., Afrimadona, Imawan, R. P., & Ramadhan, D. (2024). Authoritarian Nostalgia and Democratic Decline in Contemporary Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *43(3)*, 387–408. https://doi.org/10.1177/18681034241252452

Mardhani, D. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. In *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. pdfs.semanticscholar.org.

Mengko, D. M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, *14*(2), 193–204. https://doi.org/10.14203/JPP.V14I2.715

Mietzner, M. (2018). Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto's Indonesia. *International Political Science Review*, *39*(1), 83–96. https://doi.org/10.1177/0192512116687139

Mubarok, F. N., Puspita, M. B., Lisma, N., & Abdilla, R. R. (2022). The Military and Political Parties in Indonesia: The Ups and Downs of the Military's Political Role. *Social Impact Journal*, *1*(2), 183–190. https://doi.org/10.61391/sij.v1i2.20

Muharrom, A. A. (2019). *Civil Society Dan Partisipasi Politik (Peran Kontras Terhadap Aksi Kamisan Dalam Menuntut Penyelesaian Kasus Ham Pada Masa Orde Baru)*. repository.uinjkt.ac.id.

Murtiningsih, R. S., & Siswanto, J. (1999). Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru). *Jurnal Filsafat*.

Ng, J., & Kurniawan, Y. (2024). The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil–Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition. *Armed Forces and Society*, *50*(3), 683–709. https://doi.org/10.1177/0095327X221137281

Oktaviani, J., & Pramadya, T. P. (2019). Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli. *Indonesian Perspective*.

Paryanto, P., Lega, M., Rahmadi, A. N., Herizal, H., & Bachtiar, H. (2023). Islamophobia and Counter-Terrorism Policies in Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, *4*(2), 192–208. https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i2.33113

Paryanto, Wance, M., Hadi, A., & Suhu, B. La. (2022). Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics*, *4*(2), 150–164.

Permana, D. (2021). Model kepemimpinan masa depan indonesia dalam perspektif sipil dan militer. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik …*.

Permatasari, & Pransisca, E. N. (2021). *Konflik politik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) rezim Orde Baru (Analisis Wacana Model Norman Fairclough Terhadap Novel "Laut Bercerita"*. repositori.unsil.ac.id.

Prasasti, B. W. D., & Anggraini, P. (2020). Kritik pemerintah pada masa Orde Baru dalam naskah Mengapa Kau Culik Anak Kami? karya Seno Gumira Ajidarma. *Alayasastra*.

Prasetiadi, D. Z., Marjono, S., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. In *HIistoria*. core.ac.uk.

Pratiwi, D. A., Safitri, I., & Farika, L. (2019). Kritik sosial dalam kumpulan puisi ws rendra: kehidupan masyarakat di indonesia. *Cakrawala Linguista*.

Purbaya, B. (2019). *Politik kemananan masa Orde Baru (Studi kasus tentang gerakan penembakan misterius tahun 1982-1985)*. repositori.unsil.ac.id.

Purwanta, H. (2017). Militaristic Discourse in Secondary Education History Textbooks During and After the Soeharto Era. *Journal of Educational Media, Memory, and Society*, *9*(1), 36–53. https://doi.org/10.3167/jemms.2017.090103

Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan Demokrasi : Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi. *Welfare State*, *3*(2), 251–272.

Riza, M. F. (2020). Civilian Control of The Military in The Post-New Order Indonesia. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, *10*(1), 29–43. http://ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/12

Sahrasad, H. (2017). Soeharto's New Order, Press and Society in Tensio : A Social Reflection. *JICSA*, *06*(02), 332–385.

Sahrasad, H. (2018). The Discourse of Welfare State, Social Justice and Reality in New Order Post, Indonesia: Premilinary Notes. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in …*. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/view/7287

Said, S. H. (2015). *GESTAPU 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto*. Penerbit Mizan.

Salahudin, S., Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, J., & Paryanto, P. (2020). Islamic Political Polarisation on Social Media during the 2019 Presidential Election in Indonesia. *Asian Affairs*, *November*. https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929

Siddiq, M. (2019). Profesionalisme Militer pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*.

Simun, J. (2019). Militer sebagai Kekuatan Utama Politik Soeharto. In *academia.edu*.

Subari, S., & Hidayati, S. W. (2023). Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Sumantri, P. (2017). Dominasi militer (Angkatan Darat) dalam pemerintahan Orde Baru. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*.

Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. eprints.upnyk.ac.id.

Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement In Indonesian Politics. *International Journal on Social Science, Economics …*, *9*(4), 205–212. http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/41%0Ahttp://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/download/41/39

Yulianto, B. A. (2023). The Dynamics of Military-Police Relations in Post-Authoritarian Indonesia (1998 to 2020). *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, *28*(1), 1–25. https://doi.org/10.7454/mjs.v28i1.13559

Zakky, D., & Salsabilla, A. M. S. (2022). Analisis Good Governance pada Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi. In *Jurnal Kewarganegaraan*. download.garuda.kemdikbud.go.id.